

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DI NUSA TENGGARA BARAT

ANALYSIS OF LOCAL REGULATION POLICY IMPLEMENTATION NUMBER 5 OF 2017 REGARDING MANAGEMENT OF WATERSHED IN WEST NUSA TENGGARA

Susi Susanti^{1*}, Andi Chairil Ichsan¹, dan Budhy Setiawan¹

¹Program Studi Kehutanan, Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram.
Jl. Majapahit No. 62, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

*e-mail: susisusanty012@gmail.com

ABSTRACT

A watershed is a land area that functions as an ecological unit to collect, store, and channel rainfall to lakes or seas naturally. Effective watershed management requires supportive policies and regulations. This study aims to evaluate the implementation of Regional Regulation No. 5 of 2017 on Watershed Management in West Nusa Tenggara and to formulate planning strategies to optimize the policy's implementation. The research methods included literature review, interviews, and observation. Policy analysis was conducted using four criteria derived from William N. Dunn's theory, while management strategies were formulated using SWOT analysis. The findings indicate that the policy implementation falls under the "low" category with a score of 1.58, deeming it ineffective. The highest-scoring strategy is the Weakness-Opportunities (W-O) strategy, which emphasizes optimizing Government Regulation No. 37 of 2012 and Regional Regulation No. 5 of 2017 to enhance coordination in watershed management. These findings highlight the need for strategic measures to strengthen policy implementation for watershed management in West Nusa Tenggara.

Keywords: Watershed; Analysis; Implementation; Strategy.

ABSTRAK

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan wilayah daratan yang berfungsi sebagai satu kesatuan ekologi untuk menampung, menyimpan, dan mengalirkan air dari curah hujan ke danau atau laut secara alami. Pengelolaan DAS yang efektif membutuhkan kebijakan dan peraturan yang mendukung. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan DAS di Nusa Tenggara Barat serta merumuskan strategi perencanaan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan tersebut. Metode penelitian meliputi studi pustaka, wawancara, dan observasi. Analisis kebijakan dilakukan menggunakan empat kriteria dari teori William N. Dunn, sedangkan strategi pengelolaan dirumuskan melalui analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berada pada kategori "rendah" dengan nilai 1,58, sehingga dinyatakan belum efektif. Strategi dengan nilai tertinggi adalah strategi Weakness-Opportunities (W-O), yang menekankan optimalisasi Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2017 untuk meningkatkan

koordinasi dalam pengelolaan DAS. Temuan ini menggarisbawahi perlunya langkah strategis untuk memperkuat implementasi kebijakan DAS di Nusa Tenggara Barat.

Kata Kunci: Daerah Aliran Sungai; Analisis; Implementasi; Strategi.

PENDAHULUAN

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pencapaian tujuan pengelolaan secara berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2017, pengelolaan DAS bertujuan untuk mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dan manusia guna menjaga kelestarian ekosistem dan meningkatkan manfaat sumber daya secara berkelanjutan. Namun, penerapan kebijakan ini belum optimal, terlihat dari kondisi lahan kritis yang semakin luas dan peningkatan tingkat bahaya erosi (Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2017).

Pembentukan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai merupakan salah satu upaya untuk mengatasi kondisi kritis DAS. Selama ini, pengelolaan DAS berada di bawah pengawasan Dinas Kehutanan tanpa perencanaan yang terstruktur di tingkat lapangan. Akibatnya, pemanfaatan DAS tidak optimal, dan kerusakan terus terjadi. Data dari Badan Pusat Statistik NTB (2017) menunjukkan bahwa pengelolaan DAS menghadapi kendala seperti penurunan debit air, perambahan hutan yang lebih cepat dibandingkan laju penanaman kembali, dan gangguan akibat ternak liar. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya koordinasi dan efektivitas implementasi kebijakan yang ada.

Secara umum, landasan hukum terkait pengelolaan DAS diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS. Meskipun dasar hukum ini cukup kuat, implementasinya di tingkat daerah masih menemui banyak hambatan, termasuk kurangnya pengawasan dan koordinasi antar-stakeholder.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan DAS di NTB menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh Dunn (2003), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Selain itu, penelitian ini juga merumuskan strategi perencanaan yang dapat mendukung optimalisasi pengelolaan DAS di NTB secara berkelanjutan.

METODE

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, mulai dari 1 Agustus hingga 31 Oktober 2021. Lokasi penelitian meliputi Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat serta Kantor Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Dodokan Moyosari. Lokasi ini dipilih secara purposif karena merupakan pusat pengelolaan dan implementasi kebijakan terkait Daerah Aliran Sungai (DAS) di NTB.

Alat dan Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup: Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan DAS di NTB, referensi hasil studi pustaka, dan kuisioner untuk mengumpulkan data primer. Sementara alat yang digunakan meliputi: alat tulis kantor (ATK), kamera untuk dokumentasi visual, dan perekam suara (recorder) untuk mencatat wawancara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (*mixed methods*). Metode penelitian kombinasi adalah metode penelitian yang mengombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan obyektif. Metode kualitatif berperan untuk memperoleh data kuantitatif yang terukur dapat bersifat deskriptif, komparatif dan asosiatif, sedangkan metode kuantitatif berperan untuk membuktikan, memperdalam, memperluas, memperlemah dan menggugurkan data kuantitatif yang telah diperoleh (Sugiyono, 2015).

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui empat teknik utama: Studi Pustaka untuk mengkaji literatur dan dokumen yang relevan dengan pengelolaan DAS; Observasi untuk mengamati langsung kondisi DAS dan aktivitas pengelolaannya di lokasi penelitian; Dokumentasi mengumpulkan data visual dan dokumen terkait sebagai bukti pendukung; dan Wawancara yang dilakukan dengan pihak terkait seperti pengelola DAS, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mendapatkan data kualitatif yang mendalam.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan kuantitatif.

1. Analisis Data Kualitatif

Data dianalisis dengan mendeskripsikan objek penelitian, menentukan strategi, dan mengevaluasi kebijakan. Pendekatan melibatkan teknik *purposive sampling* untuk pemilihan lokasi penelitian, Matriks EFAS dan IFAS untuk analisis SWOT, serta analisis isi (*content analysis*) untuk mengevaluasi kebijakan.

2. Analisis Data Kuantitatif

Data kuantitatif diperoleh melalui kuisioner berbasis Skala Likert dengan tiga kategori:

Tercapai (T) diberi skor 3, Cukup Tercapai (CT) diberi skor 2, dan Tidak Tercapai (TT) diberi skor 1. Data dianalisis menggunakan model evaluasi kebijakan William N. Dunn (Ichsan *et al.*, 2019) yang dalam penelitian ini mencakup efektivitas, efisiensi, pemerataan, dan responsivitas.

Tabel berikut menunjukkan teknik analisis data yang digunakan:

Tabel 1. Analisis Data Kualitatif

Table 1. Qualitative Data Analysis

No	Objek Penelitian	Metode
1	Lokasi Penelitian	Purposive Sampling
2	Penentuan Strategi	Matriks EFAS, Matriks IFAS dan SWOT
3	Evaluasi Kebijakan	Content Analysis

Tabel 2. Analisis Data Kuantitatif

Table 2. Quantitative Data Analysis

No	Variabel	Skala Jawaban		
		T	CT	TT
1	Efektivitas			
2	Efisiensi			
3	Perataan			
4	Responsifitas			

Keterangan: T= Tercapai diberi skor 3; CT= Cukup Tercapai diberi skor 2; dan TT= Tidak Tercapai diberi skor 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 dinilai berdasarkan empat kriteria utama: efektivitas, efisiensi, perataan, dan responsivitas. Setiap variabel memiliki indikator spesifik yang dinilai menggunakan skala Likert, di mana skor 1 menunjukkan indikator tidak tercapai, skor 2 cukup tercapai, dan skor 3 tercapai. Hasil penilaian dirangkum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Penilaian Implementasi Kebijakan
Table 3. Policy Implementation Assessment Result

Variabel	Indikator	Nilai	Nilai Rata-rata	Keterangan
Efektifitas	- Kebijakan telah menjadi landasan hukum dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Nusa Tenggara Barat	2	1,33	- Kebijakan belum menjadi landasan hukum dalam setiap pengambilan keputusan, pelaksanaan sinkronisasi program dan proses koordinasi dan pelaksanaan program di lapangan
	- Kebijakan telah menjadi dasar untuk pelaksanaan sinkronisasi program antar para pihak	1		
	- Kebijakan digunakan dalam setiap proses koordinasi dan pelaksanaan program di lapangan	1		
Efisiensi	- Kebijakan dilakukan dengan biaya yang efisien	3	2	- Dilakukan dengan biaya yang efisien dan rencana pengelolaan cukup sesuai, namun cara mencapai efektifitas tidak jelas.
	- Rencana pengelolaan Daerah Aliran Sungai sesuai dengan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	2		
	- Cara untuk mencapai efektifitas kebijakan telah diuraikan di dalam peraturan daerah secara jelas dan sistematis	1		
Perataan	- Kebijakan telah menjadi dasar terkait program pengelolaan Daerah Aliran Sungai di seluruh kabupaten/kota	1	2	- Belum menjadi dasar program pengelolaan Daerah Aliran Sungai, sedangkan distribusi pembagian tugas jelas
	- Distribusi pembagian tugas telah diuraikan secara terstruktur dan jelas	3		
Responsifitas	- Implementasi kebijakan telah memberikan dampak dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai	1	1	- Kebijakan belum memberikan dampak dan kepuasan stakeholder, serta belum memenuhi aspirasi para pihak
	- Kebijakan telah memberikan kepuasan terhadap para stakeholder	1		
	- Kebijakan telah memenuhi aspirasi dari para pihak terkait pengelolaan Daerah Aliran Sungai	1		
	- Proses penyusunan kebijakan telah melibatkan para pihak secara aktif dalam mendorong aspirasinya	1		

Keterangan (Remark): Skor (Score) 1,00-1,66= Rendah, 1,67-2,33= Sedang, 2,34- 3,00= Tinggi.

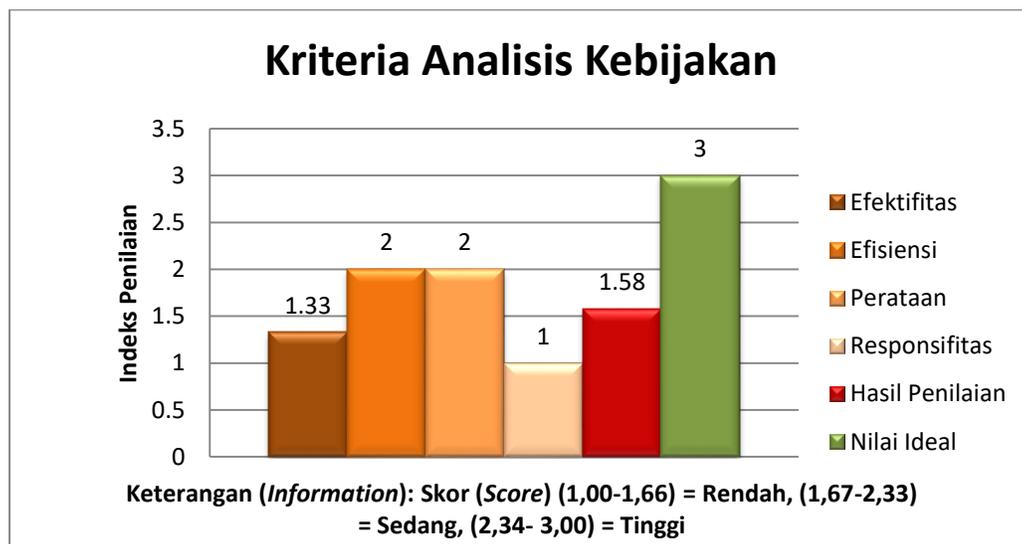
Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa rata-rata skor efektivitas sebesar 1,33 menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berada pada kategori rendah. Hal ini disebabkan oleh Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan DAS belum sepenuhnya dijadikan landasan hukum dalam pengambilan keputusan. Selain itu, koordinasi antar pihak terkait masih kurang optimal, yang mengakibatkan sinkronisasi dalam pelaksanaan program belum berjalan sebagaimana mestinya. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan langkah strategis seperti sosialisasi yang lebih luas, penguatan koordinasi antar lembaga, serta integrasi kebijakan ke dalam kerangka kerja operasional instansi yang relevan.

Kriteria efisiensi mendapatkan nilai rata-rata 2,00, yang masuk dalam kategori sedang. Pelaksanaan kebijakan dinilai efisien dari segi biaya, dan rencana pengelolaan DAS telah cukup sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017. Namun, rincian mengenai cara mencapai tujuan kebijakan belum diuraikan dengan jelas dalam peraturan ini. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan hambatan dalam implementasi kebijakan di lapangan. Untuk meningkatkan efisiensi, peraturan perlu dilengkapi dengan panduan operasional yang rinci, termasuk mekanisme implementasi dan evaluasi yang jelas.

Penilaian perataan memperoleh nilai rata-rata 2,00, yang juga masuk dalam kategori sedang. Meskipun distribusi pembagian tugas telah dijelaskan secara terstruktur dalam peraturan, penerapannya belum seragam di seluruh kabupaten/kota. Beberapa kabupaten lebih cenderung menggunakan peraturan lain yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, bukan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan komitmen di tingkat daerah untuk mengacu pada kebijakan ini sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan DAS.

Responsivitas kebijakan mendapatkan nilai rata-rata 1,00, yang masuk dalam kategori rendah. Kebijakan ini belum memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan DAS, baik dalam hal pemenuhan aspirasi masyarakat maupun kepuasan para stakeholder. Kurangnya keterlibatan aktif masyarakat dan para pihak terkait dalam proses penyusunan kebijakan menjadi salah satu kendala utama. Untuk meningkatkan responsivitas, diperlukan langkah strategis yang melibatkan para stakeholder secara aktif dalam implementasi kebijakan serta mekanisme evaluasi yang transparan agar dampak kebijakan lebih dirasakan oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan DAS di Provinsi Nusa Tenggara Barat belum optimal, dengan rata-rata skor keseluruhan sebesar 1,58 (kategori rendah). Hal ini menegaskan perlunya pendekatan strategis yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, perataan, dan responsivitas kebijakan demi pengelolaan DAS yang lebih baik di masa depan.



Gambar 1. Hasil Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2017
Figure 1. Results of the Analysis Implementation of Regional Regulation Policy No. 5 of 2017

Nilai rata-rata setiap variabel diperoleh menggunakan rumus mean, yang mencerminkan rata-rata kinerja dari seluruh indikator. Setelah dilakukan akumulasi, nilai rata-rata keseluruhan adalah

1,58, yang masuk dalam kategori rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan DAS belum berjalan secara efektif.

Menurut Yumantoko (2020), efektivitas suatu peraturan dapat dievaluasi melalui dua aspek utama: pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat dan pihak yang terlibat, serta minimnya konflik antara masyarakat dan pengelola. Upaya untuk memenuhi aspirasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting, karena semakin banyak aspirasi yang terpenuhi dan semakin sedikit konflik yang terjadi, semakin besar kemungkinan peraturan tersebut dianggap efektif. Dalam konteks ini, rendahnya nilai rata-rata pada indikator responsivitas dan efektivitas mencerminkan kurangnya perhatian terhadap dua aspek tersebut.

2. Strategi Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Analisis SWOT digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam pengelolaan DAS di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran strategis terhadap pengelolaan DAS guna meningkatkan efektivitas kebijakan yang ada.

a. Analisis Kekuatan

Menurut Sutrisno (2016), kekuatan (strength) adalah kompetensi khusus yang memberikan keunggulan komparatif. Kekuatan dalam pengelolaan DAS mencakup berbagai aspek yang mendukung keberhasilan program, seperti tersedianya sumber daya manusia yang berpengalaman, tupoksi yang jelas pada instansi terkait, dan kesatuan pengelolaan hutan di tingkat tapak.

Tabel 4. Analisis Kekuatan

Table 4. Strength Analysis

No	Kekuatan	Bobot	Rating	Skor
1	Tersedianya sumber daya manusia yang berpengalaman	0,32	3	0,96
2	Tersedianya tupoksi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Hutan Lindung Dodokan Moyosari	0,25	3	0,75
3	Tersedianya kesatuan pengelola hutan tingkat tapak	0,30	3	0,90
				2,61

Tabel 4 menunjukkan bahwa kekuatan terbesar adalah "tersedianya sumber daya manusia yang berpengalaman" dengan skor 0,96. Ketersediaan SDM yang kompeten, seperti yang dinyatakan oleh Panggabean (2004), merupakan elemen penting dalam organisasi, karena SDM memainkan peran sentral dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan fungsi, dan keberlanjutan organisasi. Berdasarkan wawancara, SDM yang tersedia terbagi ke dalam dua tupoksi utama, yaitu pelaksanaan lapangan dan pengelolaan administratif. Koordinasi antar tupoksi ini merupakan faktor penting yang perlu terus ditingkatkan agar potensi kekuatan dapat dimanfaatkan secara optimal.

b. Analisis Kelemahan

Kelemahan pada proses pengelolaan DAS di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Analisis Kelemahan

Table 5. Weakness Analysis

No	Kelemahan	Bobot	Rating	Skor
1	Belum memadai sarana & prasarana pengelolaan Daerah Aliran Sungai	0,38	1	0,38
2	Kurangnya data yang tersedia terkait Daerah Aliran Sungai	0,39	3	1,17
3	Pengurus Daerah Aliran Sungai di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengalami perubahan	0,35	2	0,70
Total				2,26

Kelemahan utama dalam pengelolaan DAS, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5, adalah kurangnya data yang tersedia terkait DAS dengan skor 1,17. Hal ini berdampak pada perencanaan program yang tidak optimal. Selain itu, perubahan struktur organisasi dari Dinas Kehutanan menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) pada tahun 2017 juga memberikan tantangan adaptasi yang signifikan bagi pengurus baru. Ketiadaan data yang memadai membatasi kemampuan DLHK dan Balai Pengelolaan DAS dalam merancang kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan sistem pengumpulan data secara terintegrasi dan berkelanjutan..

c. Analisis Peluang

Analisis peluang merupakan suatu aspek yang terdapat atau muncul dari luar (faktor eksternal) sistem pengelolaan, adanya peluang tersebut dapat mendorong perkembangan untuk meningkatkan pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Ikhsan & Aid (2011) menyatakan beberapa faktor yang bersifat eksternal yaitu faktor-faktor domain luar yang tidak diketahui dan tidak dapat dikendalikan oleh pelaku secara internal untuk terlibat langsung.

Peluang utama yang diidentifikasi adalah adanya dukungan dari berbagai pihak, seperti LSM, Forum DAS, Bappeda, dan Dinas terkait lainnya, dengan skor tertinggi sebesar 1,14 (Tabel 6). Dukungan ini mencerminkan potensi sinergi lintas sektor yang dapat dioptimalkan untuk mengatasi berbagai kelemahan dalam pengelolaan DAS.

Tabel 6. Analisis Peluang

Table 6. Opportunity Analysis

No	Peluang	Bobot	Rating	Skor
1	Adanya dukungan serta bantuan dari beberapa pihak seperti, Forum DAS, LSM, BWS, Bappeda, Dinas Pertanian, dan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan	0,38	3	1,14
2	Adanya dukungan Peraturan Pemerintah N0 37 Tahun 2012, Juklak, dan Juknis	0,36	3	1,08
3	Adanya peluang pengolahan lahan kering	0,35	2	1,05
Total				3,27

Seperti yang dikemukakan oleh Nasution & Sujianto (2017), regulasi seperti Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 dapat menjadi instrumen hukum yang mendukung pengelolaan DAS secara holistik. Dengan memanfaatkan peluang ini, pemerintah dapat mengembangkan program kolaboratif yang melibatkan para pemangku kepentingan untuk mempercepat implementasi kebijakan DAS.

LSM, BWS, Bappeda, Dinas Pertanian, dan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan	juknis secara optimal dan memanfaatkan Kesatuan Pengelolaan Hutan tingkat tapak sesuai tugas yang telah disusun untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai	meningkatkan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai guna mengoptimalkan peran antar instansi sehingga terciptanya tenaga teknis, sarana dan prasarana yang memadai.
2. Adanya dukungan Peraturan Pemerintah NO 37 Tahun 2012, Juklak, dan Juknis	$S1+O1 = 0,96+1,14 = 2,10$	$W2+O1 = 1,17+1,14 = 2,31$
3. Adanya peluang pengolahan lahan kering		
Threat (T)	Melaksanakan sosialisasi terkait isi perda yang tertuang kepada semua pihak terkait dan menjelaskan program-program yang akan dilaksanakan untuk menciptakan pemahaman yang sama kepada semua pihak secara bersamaan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai.	Mensinkronisasi tugas pokok dan fungsi dari setiap instansi dalam pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai untuk mengoptimalkan peran masing-masing.
1. Kesadaran masyarakat masih kurang		
2. Pemanasan global		
3. Degradasi hutan dan lahan	$S1+T2 = 0,96+0,70 = 1,66$	$W2+T2 = 0,78+1,05 = 1,83$

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil analisis menunjukkan nilai tertinggi dari matriks SWOT adalah pada strategi W-O dengan skor sebesar 2,31. Strategi W-O merupakan salah satu pendekatan yang bertujuan untuk meminimalkan kelemahan internal sehingga dapat memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Rangkuti (2017) menjelaskan bahwa strategi ini dirancang untuk memanfaatkan peluang melalui upaya mengurangi kelemahan yang dimiliki. Strategi ini dapat diterapkan dengan mengoptimalkan peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang berlaku guna meningkatkan koordinasi yang baik dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Hal ini dilakukan agar tercipta tenaga teknis yang kompeten serta tersedia sarana dan prasarana yang memadai.

Selanjutnya, strategi S-O, dengan nilai sebesar 2,10, merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memanfaatkan seluruh kekuatan internal demi meraih dan mengoptimalkan peluang yang ada. Strategi S-O digunakan untuk mengarahkan kekuatan yang dimiliki agar dapat memaksimalkan peluang yang tersedia. Menurut Irawan (2018), strategi ini memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk menangkap peluang eksternal. Apabila perusahaan memiliki banyak kelemahan, maka kelemahan tersebut harus diatasi agar menjadi kekuatan. Sementara itu, jika perusahaan menghadapi ancaman, upaya yang dilakukan adalah menghindari ancaman tersebut dan fokus pada peluang yang ada agar pengelolaan Daerah Aliran Sungai dapat berjalan optimal.

Strategi berikutnya, yang berada pada urutan ketiga, adalah strategi W-T dengan nilai sebesar 1,83. Strategi W-T dirancang untuk meminimalkan kelemahan internal sekaligus menghindari ancaman eksternal. Menurut Arifianto (2017), strategi ini merupakan upaya bertahan dengan cara mengurangi kelemahan yang ada dan menghindari ancaman. Perusahaan yang menghadapi kelemahan internal serta ancaman eksternal secara bersamaan sebenarnya berada dalam posisi yang rawan. Oleh karena itu, strategi W-T diperlukan untuk mengurangi risiko tersebut.

Strategi dengan nilai terendah adalah strategi S-T, yang memiliki skor sebesar 1,66. Strategi S-T bertujuan untuk mengatasi ancaman eksternal dengan memanfaatkan kekuatan internal. Strategi ini digunakan untuk menghadapi dan mengurangi dampak ancaman melalui pendayagunaan kekuatan yang dimiliki. Ramadhan & Sofiyah (2013) menyatakan bahwa strategi ini melibatkan upaya perusahaan untuk menghindari atau memitigasi dampak dari ancaman eksternal. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi terkait isi peraturan daerah (perda) kepada semua pihak yang terkait serta menjelaskan program-program yang akan dilaksanakan. Tujuannya adalah menciptakan pemahaman yang sama di antara seluruh pihak berdasarkan tujuan yang ingin dicapai.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih tergolong rendah, dengan nilai rata-rata 1,58 berdasarkan empat kriteria evaluasi: efektivitas, efisiensi, perataan, dan responsivitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya menjadi landasan hukum dalam pengelolaan DAS, belum diterapkan secara merata di seluruh kabupaten/kota, dan belum mampu memberikan dampak signifikan bagi stakeholder.

Strategi yang direkomendasikan untuk mengoptimalkan pengelolaan DAS adalah strategi Weakness-Opportunities (W-O), dengan memanfaatkan peluang dari keberadaan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2017. Implementasi strategi ini memerlukan peningkatan koordinasi antar pihak terkait, sosialisasi kebijakan yang lebih luas, serta penyusunan panduan operasional yang jelas dan terukur untuk mendukung pelaksanaan kebijakan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifianto, E.Y. 2017. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Pendekatan Pola Komunikasi Efektif dalam Mewujudkan Konsep Smart City. *Jurnal Komunikasi Global*. 6(2): 175-184.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2017. Tentang Daerah Aliran Sungai.
- Dunn, W.N. 2003. *Analisa Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Ichsan, A.C., Markum, & Silamon, R.F. 2019. Policy Performance Analysis of Aikbual Village Regulation Number 1 2014 Concerning Biodiversity Management to Supporting Social Forestry in West Nusa Tenggara. *Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES)*. 14(2): 111-116.
- Ikhsan, S., & Aid, A. 2011. Analisis SWOT untuk Merumuskan Strategi Pengembangan Komoditas Karet di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. *Jurnal Agribisnis Pedesaan*. 1(3): 166-177.
- Irawan, E. 2018. Dinamika Pencapaian Konsensus Dalam Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai: Suatu Pemodelan Berbasis Agen (the Dynamic of Reaching Concensus in the Coordination Forum of Watershed Management: an Agent-Based Modeling). *Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. 2(1): 45-60.
- Nasution, I., & Sujianto, S. 2017. Evaluasi Implementasi Kebijakan Tentang Tatanan Kemandirian Nasional (Studi pada Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*. 4(2): 1-13.

- Panggabean, M.S. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
- Ramadhan, A., & Sofiyah, F.R. 2013. Analisis SWOT sebagai Landasan dalam Menentukan Strategi Pemasaran (Studi Kasus McDonald'S Ring Road). *Jurnal Media Informasi Manajemen*. 1(4): 1-10.
- Rangkuti, F. 2017. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Rizal, M.A., & Hana, S.M. 2019. Strategi Pengembangan Bisnis Angkutan Kereta Api Kontainer di PT Kereta Api Logistik Menggunakan Metode SWOT dan QSPM. *Jurnal Logistik Bisnis*. 9(2): 39-47.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfa Beta. Bandung.
- Sutrisno, E. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Yumantoko. 2020. Kajian Kebijakan Dalam Merekogonis Masyarakat Adat. *Jurnal Belantara*. 3(1): 48-58.